

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP)
TAHUN 2019**



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2019**

MARABAHAN,

2020

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Swt, sholawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad Saw ,karena atas segala rahmat dan ridhonya jualah penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Tahun 2018 ini dapat selesai tepat waktu sesuai dengan yang diharapkan. Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah sebagai wujud implementasi Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada Rencana Stratejik Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala yang telah ditetapkan.

Laporan Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 memuat ukuran capaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran) yang dijabarkan dalam kegiatan dan program, serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya selama kurun waktu 1 (satu) tahun .

“ Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang telah kami susun, terlepas dari kendala itu semua kami telah berupaya secara oftimal sesuai dengan kemampuan yang kami miliki agar laporan yang kami sampaikan berada pada posisi yang sesuai dengan standar atau kriteria penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Demikian Laporan Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 ini disampaikan agar dapat dijadikan sebagai salah satu bahan evaluasi terhadap capaian kinerja Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019, dan besar harapan kami agar hasil evaluasi tersebut memperoleh nilai (value) yang lebih baik dari tahun sebelumnya.

Marabahan, Februari 2020

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

M.ANJAR WIJAYA,S.SOS
NIP. 19640424V198503 1 017

DAFTAR ISI

Kata Pengantar
Daftar Isi
Ringkasan Eksekutif
BAB I PENDAHULUAN
 1.1 Latar belakang
 1.2 Tugas pokok dan fungsi
 1.3 Isu Strategis Satpol PP...

BAB.II.PERENCANAAN KINERJA
 2.1 Rencana strategis
 2.2 Indikator kinerja utama
 2.3 Perjanjian kinerja 2019

BAB.III.AKUNTABILITAS KINERJA
 3.1 Capaian Kinerja Satpol PP Kabupaten Batola
 3.2 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja
 3.2.1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja Satpol PP
 3.2.2 Meningkatnya tertib administrasi barang
 3.3.6 Meningkatnya kualitas pelaporan keuangan Pemkab Batola

BAB IV PENUTUP

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Satuan Polisi Pamong Praja PP selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Satpol PP sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Barito Kuala, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, akan tetapi juga memperhatikan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimasi sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Intruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sehubungan dengan hal tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

B. Tugas Pokok dan Fungsi .

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 35 Tahun 2016, setatus Satpol PP setara dengan dinas / badan sedang kepala satpol PP adalah Eselon II untuk tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala adalah : *“Menegakkan Perda, peraturan Kepala daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan Ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat*

Tugas Pokok :

- a. Perumusan dan Penetapan kebijakan teknis di bidang penegakan produk hokum daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat sesuai ketentuan perundang undangan.
- b. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang penegakan produk hokum, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat.
- c. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi dilingkungan satuan Polisi Pamong Praja`
- d. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang penegakan penegakan produk hokum, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat.
- e. Pengevaluasian atas pelaksanaan tugas dibidang penegakan produk hukum, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat.

Fungsi :

- a. Menyusun dan menetapkan kebijakan teknis sebagai pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang trantibum dan linmas.
- b. Menetapkan program, kegiatan, standard operasional dan tata waktu pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang trantibum dan linmas.
- c. Mengkoordinasikan dan membina pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang trantibum dan linmas, yang menjadi tugas pokok dan fungsi satuan Polisi Pamong Praja.
- d. Melaksanakan rapat, pelatihan, dan bimbingan teknis secara rutin kepada semua aparatur dalam lingkup Satuan Polisi Pamong Praja.
- e. Mengendalikan pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang trantibum dan linmas, yang menjadi tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.
- f. Menyelenggarakan dan atau memfasilitasi kerja sama dengan satuan kerja perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang trantibum dan linmas.
- g. Mengevaluasi dan menilai secaraabperiodik hasil-hasil pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang trantibum dan linmas, yang menjadi tugas pokok dan fungsi Satuan Poliasi Pamong Praja.

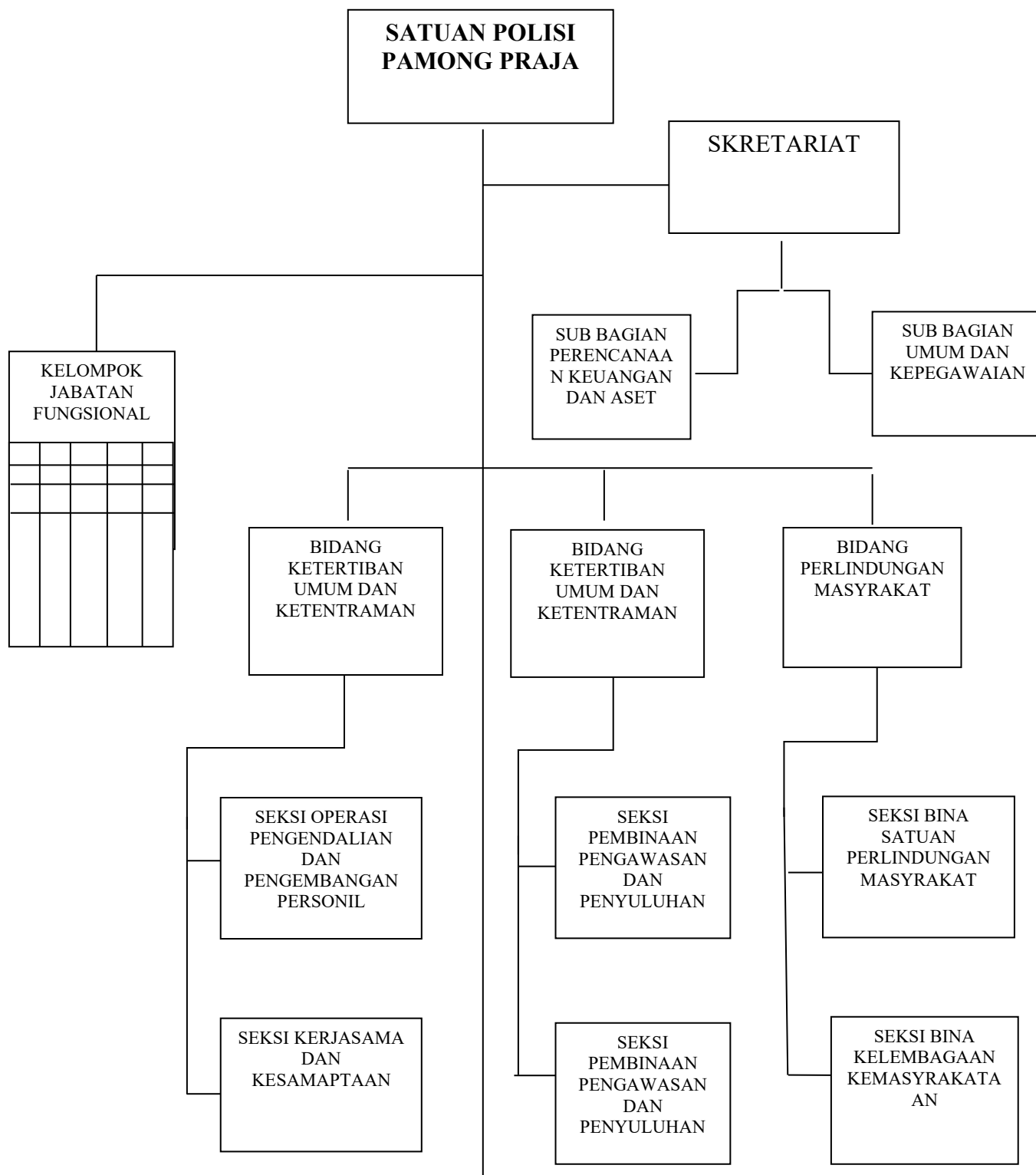
- h. Mengendalikan perencanaan, pemanfaatan serta pencatatan anggaran dan kekayaan daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja.
- i. Melaksanakan pembinaan sikap prilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, selaku individu dan dalam organisasi Dinas urusan pemerintah daerah di bidang trantibum dan linmas.
- j. Menyajikan dan melaporkan akuntabilitas hasil kinerja dan hasil penilaian kinerja, sebagai suatu pertanggung jawaban kepala dinas dalam pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang trantibum dan linmas
- k. Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung penyelenggaraan urusan bidang trantibum dan linmas.
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bupati, wakil bupati dan sekretaris daerah.

Berikut susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Barito
Kuala :

- 1. Kepala Satuan, Membawahkan :**
- 2. Sekretaris**
 - a. Sub Bagian program Keuangan Dan Aset**
 - b. Sub.bagian kepegawaian dan umum,**
- 3. Bidang Kantrantibum**
 - a. Seksi Operasi dan pengawasan**
 - b. Seksi kerjasama dan kesemaptaan**
- 4. Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah**
 - a. Seksi Lidik dan Penindakan**
 - b. Seksi Pemb.Pengawasan dan Penyuluhan**
- 5. Bidang LINMAS**
 - a. Bina Perlindungan masyarakat**
 - b. Potensi Kelembagaan**
- 6. UPT. DAMKAR**
- 7. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**



Struktur Organisasi





UPT
DAMKAR

C. Isu Strategis Satuan Polisi Pamong Praja

Isu Strategis yang berkaitan dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kala dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya dihadapkan pada beberapa hal, yang dapat kami uraikan sebagai berikut :

1. Masih belum optimalnya dalam Penanganan penegakan PERDA ;

Seperti diketahui bahwa penertiban pedagang kaki lima, perijinan, penindakan,penyelidikan dan patroli harus jelas dan terukur kita laksanakan yang dituangkan dalam rencana kerja tahunan. Ada 4 pilar yang harus ditekankan.

- 1) Data base
- 2) Efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan;
- 3) Koordinasi penanganan lintas bidang juga SKPD lain.
- 4) Intensitas dalam penegakan PERDA`

D. Landasan Hukum

1. Undang Undang Republik Indonesia tahun 1999 tentang tentang penyelenggaraan Negara Yang bersih dan bebas Dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme
2. Perpres Nomor 29 tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja pemerintah
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dann tata Cara revisi atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah



4. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor :70 tahun 2018 tentang Penetapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dilingkungan Kabupaten Barito Kuala
- E. Sistematika Penyusunan Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menyajikan Gambaran Umum, Tugas Pokok dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan Ringkasan Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu, IKU dan Perjanjian Kinerja Tahun 2019

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menjelaskan akuntabilitas kinerja uang meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP





BAB II. PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Berdasarkan Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor : Tahun 2018 Tentang Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala maka tujuan , Indikator tujuan, sasaran dan indicator sasaran satuan Polisi Pamong Praja Barito Kuala adalah

2.1.1 Tujuan

Tujuan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja adalah Meningkatnya Ketentraman, Keteriban Umum dan Perlindungan Masyarakat dengan Indikator Tujuan Persentase Tingkat Penyelesaian Ketertiban dan Ketentraman (70,50 0%).

c. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dari Satpol PP :

Meningkatnya Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan perlindungan masyarakat dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) :

1. Persentase Kecamatan dengan kondisi tentram dan tertib (65%)
2. Persentase Penurunan Kasus Pelanggaran PERDA dan PERKADA yang ditindak lanjuti dengan target (79%)
3. Persentase Penanggulangan Kebakaran dengan target (55%)



Tabel : 2.1
Tujuan, Sasaran dan Indikator Renstra SKPD Satuan Polisi
Pamong Praja 2017-2022.

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Utama
1.	Meningkatnya Ketenteraman, Keteriban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Tingkat Penyelesaian Ketertiban dan Ketenteraman (70,50 0%).	Meningkatnya Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan perlindungan masyarakat	Persentase Kecamatan dengan kondisi tentram dan tertib (65%)
2.				Persentase Kasus Pelanggaran PERDA dan PERKADYang ditindak lanjuti (79%)
3.				Persentase Penanggulangan Kebakaran (55%)

2.2. Perjanjian Kinerja 2019

Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut : Perjanjian Kinerja (PK) Pejabat Eselon II (Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.



Tabel 2.3.
Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program kegiatan	Anggaran
1.	Meningkatnya Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan perlindungan masyarakat	Persentase Kecamatan dengan kondisi tentram dan tertib	%	65	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	625.871.400,-
		Persentase Kasus Pelanggaran PERDA dan PERKADAYang ditindak lanjuti	%	79	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	103.224.250,-
		Persentase Penanggulangan Kebakaran	%	55	Penanggulangan bahaya Kebakaran	140.350.000





BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam Dokumen Renstra Tahun 2017-2022, RKT Tahun 2019, Renja Tahun 2019, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2019.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*).

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :



Tabel. 3.1
Predikat Nilai Capaian Kinerja

Persentase	Predikat
<100	Tidak tercapai
= 100	Tercapai/Sesuai target
>100	Melebihi target

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

Tabel .3.2
Predikat Capaian Kinerja untuk Realisasi Capaian Kinerja yang Tidak tercapai

No	Kategori	Capaian
1	Sangat baik	>90
2	Baik	75 – 89,99
3	Cukup	65 – 74,99
4	Kurang	50 – 64,99
5	Sangat kurang	0 – 49,99

3.1 Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Dengan



demikian IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Satuan Polisi Pamong Praja telah menetapkan Indikator Kinerja Utama Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Nomor 900/272/Satpol Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2017-2022.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2018 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja
Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatny a ketenteraman , Ketertiban Umum dan perlindungan masyarakat	a. Persentase Kecamatan dengan kondisi tentram dan tertib	%	65	64,70	99,53
		b. Persentasi pelanggaran PERDA dan Perkada yang ditindak lanjuti	%	79	78,80	99,74
		c. Persentase Penangulang an Kebakaran	%	50	44,44	80

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama pada:



Tabel 3.4

**Capaian Kinerja Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja
(data Substantif) Tahun 2019**

No	Uraian Capaian Substantif (Produksi/ Produktivitas/ dst	Capaian Substantif		% Kenaikan/ Turun
		2018	2019	
1	Persentase Kecamatan dengan kondisi tentram dan tertib	91,66	99,53%	Naik 7,87 %
2	Persentasi pelanggaran PERDA dan Perkada yang ditindak lanjuti	95,50	99,74%	Kenaikan 4,24
3.	Persentase Penanggulangan Kebakaran	90	80%	Turun 10 %

Tabel 3.5

**Capaian IKU Satuan Polisi Pamong Praja
Berdasarkan Persentase
Tahun 2019**

Persentase	Predikat	Jumlah Indikator
<100	Tidak tercapai	3
= 100	Tercapai/ Sesuai target	0
>100	Melebihi target	0



Tabel 3.6
Capaian IKU Satuan Polisi Pamong Praja
Berdasarkan Kategori
Tahun 2019

No	Kategori	Capaian	Jumlah Indikator
1	Sangat baik	>90	2
2	Baik	75 – 89,99	1
3	Cukup	65 – 74,99	0
4	Kurang	50 – 64,99	0
5	Sangat kurang	0 – 49,99	0

3.2 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis

Dalam laporan ini, Satuan Polisi Pamong Praja dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2017-2022 maupun Renja Tahun 2019.

Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2019 dan Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Keputusan Kepala Satuan



Polisi Pamong Praja, Nomor 900/272/Satpol PP Tahun 2019. tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja telah ditetapkan 1 (satu) sasaran strategis dengan 4 (empat) indikator kinerja dengan rincian sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1	INDIKATOR KINERJA UTAMA
Meningkatnya ketenteraman , Ketertiban Umum dan perlindungan masyarakat	1. Persentase Kecamatan dengan kondisi aman dan tertib
	2. Persentasi penurunan pelanggaran PERDA dan Perkada yang ditindak lanjuti
	3. Persentase Penanggulangan Kebakaran

Tabel 3.7

**Capaian Kinerja Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja
Tahun 2019**

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian Sasaran	Predikat
1	Sasaran Strategis 1	3	0	Melebihi target
2			3	Sesuai target

Tabel 3.8

**Capaian Kinerja Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja
Tahun 2019**

[illegible]**Tabel 3.9**

Pencapaian Target Sasaran Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2019

[illegible]



Sasaran Strategis “Meningkatnya Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan masyarakat”

Sasaran “Meningkatnya Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat” adalah merupakan sarana untuk mendukung tercapainya indikator Sasaran RPJMD Kabupaten Barito Kuala “Tingkat Penyelesaian K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan) (70,50%).

Untuk merealisasikan tercapainya “Sasaran Meningkatkan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat” tersebut sebagai ukuran keberhasilannya ditetapkan 4(empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu :

1. Persentase Kecamatan dengan kondisi aman dan tertib
2. Persentase Penurunan pelanggaran PERDA dan Perkada yang ditindak lanjuti
3. Persentase Penanggulangan Kebakaran

Capaian Kinerja Tahun 2019 untuk masing-masing indikator kinerja tersebut dapat dijelaskan berikut :

1. Capaian Indikator Kinerja “*Prosentase Kecamatan dengan kondisi tentram dan tertib*”.

Yang dimaksud dengan “*Prosentase Kecamatan dengan kondisi tentram dan tertib*” adalah kondisi dimana masyarakat dapat melakukan aktivitas sehari-hari tidak ada gangguan trantibum.

Dengan rumus formulasi perhitungan :

$$\frac{\text{Jumlah Kecamatan Dalam Keadaan tidak ada gangguan trantibum}}{\text{Jumlah Kecamatan Dalam Kabupaten Barito Kuala (17 Kec)}} \times 100$$

Berdasarkan Renstra SKPD Satpol PP Tahun 2017 – 2022, Indikator Kinerja “*Prosentase Kecamatan dengan kondisi tentram dan tertib*”, ditargetkan 65% .



Berdasarkan data dari Bidang PPHD Satpol PP Kab.Barito Kuala, pada tahun 2019 dari 17 kecamatan yang tidak ada gangguan trantibum sebanyak 11 kecamatan (64,70 %) (11 Kecamatan : 17 Kecamatan x 100%)

Dengan demikian Capaian Indikator Kinerja “*Prosentase Kecamatan dengan kondisi tentram dan tertib*” adalah sebagai berikut :

Rumus Perhitungan Capaian Kinerja Makin Tinggi Realisasi Makin Baik Capaian Kinerja :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target/Rencana}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Capaian Kinerja Persentase} \\ \text{Kecamatan dengan kondisi} \\ \text{tentram dan tertib} &= \frac{64,70 \%}{65 \%} \times 100\% \\ &= 99,53 \%. \end{aligned}$$

Capaian Indikator Kinerja “*Prosentase Kecamatan dengan kondisi tentram dan tertib*” tahun 2019 sebesar 99,53 % tersebut, dibandingkan dengan Capaian Kinerja pada tahun 2018 sebesar 90,50 %, maka mengalami peningkatan/mengalami penurunan/sama dengan capaian tahun 2018.

Capaian Indikator Kinerja “*Prosentase Kecamatan dengan kondisi tentram dan tertib*” tahun 2019 dengan capaian 64,70% dibanding dengan target diakhir Rensta 72 %, maka diketahui bahwa capaian kinerja tahun 2019 telah mencapai 89,86 %

Tercapainya target Indikator Kinerja “*Prosentase Kecamatan dengan kondisi tentram dan tertib*” 64,70 % tersebut disebabkan dilakukannya peningkatan pengawasan atas ketertiban dan ketentraman masyarakat, yakni dengan melakukan :

- Patroli secara berkala
- Melakukan pengamanan pada setiap hari-hari besar
- Mengawal untuk pengamanan Kepala Daerah/Wakil dan Pejabat Penting.



Untuk mencapai target Indikator Kinerja “*Prosentase Kecamatan dengan kondisi tentram dan tertib*” ditunjang dengan sumberdaya berupa dana yang tersedia dalam DPA Satpol PP tahun 2019 sebesar Rp.625.871.400,-. dan telah direalisasikan sebesar Rp. 617.863.565,- (98, 72 %).

Kendala yang dirasakan selama ini untuk mencapai target Indikator “*Prosentase Kecamatan dengan kondisi tentram dan tertib*” tersebut antara lain :

- a. Tidak adanya Kotak Pengaduan
- b. Data Perda dan Perkada tidak up to date
- c. Kurangnya jumlah personil/SDM yang kompeten
- d. Patroli dan Penertiban yang kurang dilaksanakan
- e. Sarana dan Prasarana tidak mendukung

Upaya yang telah dilakukan Satpol PP Kabupaten Barito Kuala sebagai berikut :

- a. Sosialisasi Perda dan Perkada
- b. Melakukan Patroli dan Penertiban ke Kecamatan

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan, melalui langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Membuat Kotak Pengaduan
- b. Melakukan pendataan Perda dan Perkada up to date
- c. Penambahan jumlah personil/SDM yang kompeten
- d. Peningkatan Frekuensi Patroli dan Penertiban ke Kecamatan

2. Capaian Indikator Kinerja “*Persentasi Penurunan pelanggaran PERDA dan Perkada yang ditindak lanjuti*”

Yang dimaksud dengan “*Persentasi Penurunan pelanggaran PERDA dan Perkada yang ditindak lanjuti*” adalah Tingkat penyelesaian terhadap para pelanggar PERDA dan PERKADA di dalam wilayah Kabupaten Barito Kuala.



Dengan rumus formulasi perhitungan :

$$\frac{\text{Jumlah Kasus Pelanggar PERDA dan PERKADA yang dapat Ditindak lanjuti}}{\text{Jumlah Kasus Pelanggar Perda di Kabupaten Barito Kuala}} \times 100$$

Berdasarkan Renstra SKPD Satpol PP Tahun 2017 – 2022, Indikator Kinerja “*Persentasi pelanggaran PERDA dan Perkada yang ditindak lanjuti*”, ditargetkan 79%

Berdasarkan data yang didapat dari Kepala Bidang Penegakkan Produk Hukum Daerah pada tahun 2019 terdapat Kasus Pelanggaran (12 Perda dan 5 Perbup):

a. PERDA dan Perkada sebanyak 117 Kasus

Dari 117 Kasus tersebut, dapat ditindak lanjuti 112 Kasus

Kasus Perda dan Perkada yang ditindak lanjuti (112)

$$\frac{112}{117} \times 100 \%$$

Jumlah Kasus Perda dan Perkada (117)

= 95,72 %

Rumus Perhitungan Capaian Kinerja Makin Tinggi Realisasi Makin Rendah Capaian Kinerja :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target Tahun 2019}} \times 100$$

$$= \frac{(2 \times 79 \%) - 95,72 \text{ Kasus yang dapat ditindak lanjuti}}{\text{Target tahun 2019 (79\%)}} \times 100\%$$

$$= \frac{158\% - 95,72}{79\%} \times 100\%$$

= 78,80 %.



Dengan demikian Capaian Indikator Kinerja “*Persentasi Penurunan pelanggaran PERDA dan Perkada yang ditindak lanjuti*” 78,80 %.

Capaian Indikator Kinerja “*Persentasi Penurunan pelanggaran PERDA dan Perkada yang ditindak lanjuti*” tahun 2019 sebesar 78,80 % dari target 79 % atau Capaian kinerja 99,74 %, dibandingkan dengan Capaian Kinerja pada tahun 2018 sebesar 95,50%, maka mengalami mengalami penurunan dengan capaian tahun 2018.

Capaian Indikator Kinerja “*Persentasi Penurunan pelanggaran PERDA dan Perkada yang ditindak lanjuti*” tahun 2019 dengan capaian 78,80 % dibanding dengan target diakhir Renstra 60%, maka diketahui bahwa capaian kinerja tahun 2019 telah mencapai/sama dengan yang ditetapkan di akhir Renstra.

Tercapainya target Indikator Kinerja “*Persentasi Penurunan pelanggaran PERDA dan Perkada yang ditindak lanjuti*” 78,80 % tersebut disebabkan dilakukannya peningkatan Pembinaan, pengawasan dan Penyuluhan terkait Hukum Daerah, yakni dengan melakukan :

- a. Melakukan Pengawasan Terhadap Pelanggaran Perda dan Perkada
- b. Melakukan Pembinaan dan Penyuluhan terkait Produk Hukum daerah

Untuk mencapai target Indikator Kinerja “*Persentasi Penurunan pelanggaran PERDA dan Perkada yang ditindak lanjuti*” ditunjang dengan sumberdaya berupa dana yang tersedia dalam DPA Satpol PP tahun 2019 sebesar Rp.103.244.250 dan telah direalisasikan sebesar Rp..103.151.041 (99,91%).

Kendala yang dirasakan selama ini untuk mencapai target Indikator “*Persentasi Penurunan pelanggaran PERDA dan Perkada yang ditindak lanjuti*” tersebut antara lain :

- a. Kurangnya koordinasi lintas SKPD
- b. Kurangnya sosialisasi
- c. Kurangnya jumlah personil/SDM yang kompeten
- d. Satpol PP kurang dilibatkan dalam penyusunan Perda



Adapun upaya yang telah dilakukan sebagai berikut :

- a. Melakukan Penyelidikan Pelanggaran Perda dan Perkada
- b. Pembinaan, Pengawasan terhadap pelanggar Perda dan Perkada
- c. Mengikuti Rapat Koordinasi tentang Penyelesaian Pelanggar Perda dan Perkada

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan, melalui langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Melakukan koordinasi lintas SKPD
- b. Melakukan sosialisasi, pembinaan dan pengawasan pelanggar Perda dan Perkada
- c. Penambahan jumlah personil/SDM yang kompeten
- d. Satpol PP dilibatkan dalam penyusunan Perda

3. Capaian Indikator Kinerja “*Persentase Penanggulangan Kebakaran*”.

Yang dimaksud dengan “*Persentase Penanggulangan Kebakaran*” adalah Tingkat Penanganan Penanggulangan Bencana Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di dalam wilayah Kabupaten Barito Kuala.

Dengan rumus formulasi perhitungan :

$$\frac{\text{Jumlah Kejadian Kebakaran yang dapat ditanggulangi}}{\text{Jumlah Kejadian Kebakaran di Kabupaten Barito Kuala}} \times 100$$

Berdasarkan Renstra SKPD Satpol PP Tahun 2017 – 2022, Indikator Kinerja “*Persentase Penanggulangan Kebakaran*”, ditargetkan 55 % , dalam artian seluruh kejadian kasus kebakaran non hutan dan lahan dapat ditanggulangi 55 %.

Berdasarkan data yang didapat dari pada tahun 2019 di Kabupaten Barito Kuala telah terjadi 18 kasus kebakaran non hutan dan lahan.

Dari 18 Kasus kebakaran tersebut yang dapat ditanggulangi sebanyak 8 kasus.



Dengan demikian Capaian Indikator Kinerja “*Persentase Penanggulangan Kebakaran*” adalah sebagai berikut :

Rumus Perhitungan Capaian Kinerja Makin Tinggi Realisasi Makin Baik Capaian Kinerja :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Kasus Kebakaran yang ditangani}}{\text{Jumlah Kasus Kebakaran di Kab.Batola}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Capaian Kinerja Persentase} \\ \text{Penanggulangan Kebakaran} &= \frac{8}{18} \times 100\% \\ &= 44,44 \%. \end{aligned}$$

Maka capaian kinerja pada Tahun 2019 adalah :

Persentase Realisasi Tahun 2019 (44,44)

$$\text{-----} \times 100\% = 80 \%$$

Persentase target Tahun 2019 (55)

Capaian Indikator Kinerja “*Persentase Penanggulangan Kebakaran*” tahun 2019 sebesar 80 % tersebut, dibandingkan dengan Capaian Kinerja pada tahun 2018 sebesar 90 %, maka mengalami penurunan dengan capaian tahun 2018.

Capaian Indikator Kinerja “*Persentase Penanggulangan Kebakaran*” tahun 2019 dengan capaian 44,44 % dibanding dengan target diakhir Renstra 75%, maka diketahui bahwa capaian kinerja tahun 2019 masih kurang 49,25 % dari yang ditetapkan di akhir Renstra.

Tidak tercapainya target Indikator Kinerja “*Persentase Penanggulangan Kebakaran*” 100 % tersebut disebabkan :

- Masih kurang nya anggota Pemadam Kebakaran
- SDM Anggota Pemadam Kebakaran
- Masih Kurangnya WMK (Waktu Manajemen Kebakaran)



Adapun upaya yang akan dilakukan dalam penanggulangan bahaya kebakaran , yakni dengan melakukan :

- a. Posko Tanggap Darurat
- b. Melakukan pelatihan berkala anggota pemadam kebakaran
- c. Pembinaan Penggunaan APAR (Alat Pemadam Ringan)
- d. Simulasi Pencegahan Dini Bahaya Kebakaran

Untuk mencapai target Indikator Kinerja “*Persentase Penanggulangan Kebakaran*” ditunjang dengan sumberdaya berupa dana yang tersedia dalam DPA Satpol PP tahun 2019 sebesar Rp.140.350.000 dan telah direalisasikan sebesar Rp.137.474.300. (97,94 %).

Untuk mengatasi kendala tersebut, Satpol PP Kabupaten Barito Kuala melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Perlunya penambahan anggota Pemadam Kebakaran
- b. Peningkatan SDM Anggota Pemadam Kebakaran melalui Diklat Pemadam I , Diklat Pemadam II , SAR dan Scuba
- c. Pembentukan WMK (Waktu Manajemen Kebakaran) di Kecamatan sebagai perwakilan dari Posko Induk di Kabupaten



Tabel 3.10

Capaian Kinerja Sasaran “Meningkatnya Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan masyarakat”

No	Indikator Sasaran	Sat.	Tahun 2018			Targe t	Tahun 2019		Akhir Renstra		Ket.
			Targe t	Reli sasi	Capaia n		Realisasi	Capaia n	Target	Capaia n	
1.	Prosentase Kecamatan dengan kondisi tentram dan tertib	%	60	55	91,66	65	64,70	99,53	72	89,86	
2.	Persentase penurunan pelanggaran PERDA yang ditindak lanjuti	%	89	85	95,50	79	78,80	99,74	60	76,14	
3	Persentase Penanggulangan Kebakaran	%	50	45	90,00	55	44,44	80	75	59,25	

Analisis Penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja.

1. Pelanggaran PERDA Dalam mencapai target Kinerja khusus 1 Indikator Kinerja Utama dari hasil pembandingan untuk jumlah pelanggaran perda target 5 dalam waktu satu tahun sedang untuk Renstra target 363 orang pelanggaran perda/ Perbub ,ternyata akhir tahun realisasi hanya 65 orang pelanggaran Perda / Perbub antara lain.
 - a. Perda No. 07 Tahun 2005 tentang Larangan Kegiatan pada bulan Ramadhan di Kec. Alalak, Anjir Pasar, Anjir Muara dan Mandastana.
 - b. Perda No. 2 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung dan Perizinannya di Kec. Alalak, Marabahan, Tamban, Jejangkit,Barambai, Mandastana,Mekarsari, Tabunganen, Rantau Badauh dan Belawang
 - c. Perda No.5 Tahun 2014 tentang Penataan pengendalian menara Telekomunikasi di lokasi Kec. Barambai, Wanaraya,Rantau Badauh dan Tabukan
 - d. Perbub No.48 Tahun 2008 tentang Pengaturan dan Pembinaan PKL di Kec. Alalak
 - e. Perbub No.68 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Reklame di Kec.Marabahan, Alalak, Anjir Muara, Mandastana, Anjir Pasar
 - f. Perbup No. 126 Tahun 2011 tentang Perizinan dibidang Perdagangan di Kec.Alalak, Marabahan,Anjir Muara, Tamban, Jejangkit,Rantau Badauh, Tabunganen, Bakumpai, Anjir Pasar, Belawang, Mekarsari, Mandastana, Tabukan, Wanaraya, Cerbon
1. Faktor yang kurang mendukung adalah sinkronisasi dengan bidang belum optimal disamping juga faktor anggaran yang minim sehingga untuk mengadakan sosialisasi ataupun penyuluhan tentang produk hukum daerah kepada masyarakat belum sepenuhnya ataupun tidak pernah dilaksanakan dengan kondisi wilayah 17 kecamatan dan 200 desa jangkauan yang begitu luas dan perlunya penambahan anggaran agar kegiatan penyuluhan bias dilaksanakan adapun keberhasilan dari sisi capaian target adalah hasil pembinaan yang dilaksanakan di beberapa kecamatan terdekat dengan kabupaten.



2. Gangguan Kantrantibum yang diselesaikan dari hasil realisasi tahun 2019 sekitar 75 kali gangguan yang terdata dan terselesaikan sedangkan untuk tahun 2019 sekitar 75 terealisasi sesuai target yang diharapkan antara lain :
- a. Penertiban PKL di Kec. Alalak 4 pelanggaran / kasus
 - b. Penertiban PKL di Kec. Anjir Pasar 4 pelanggaran / kasus
 - c. Penertiban PKL di Kec. Rantau Badauh 4 pelanggaran / kasus
 - d. Penertiban Jalur Hijau di Kec. Alalak 8 Pelanggaran / kasus
 - e. Penertiban Perijinan di Kec. Alalak 4 pelanggaran / kasus
 - f. Penertiban Perijinan Kec. Anjir Pasar 4 pelanggaran / kasus
 - g. Penertiban Perijinan di Kec. Marabahan 4 pelanggaran / kasus
 - h. Penertiban Gepeng di Kec. Alalak 4 Pelanggaran / kasus
 - i. Penertiban Gepeng di Kec. Anjir Pasar 4 pelanggaran / kasus
 - j. Penegakan PERDA Ramadhan di kec. Alalak 5 pelanggaran / kasus
 - k. Penegakan PERDA Ramadhan Kec. A. Muara 5 pelanggaran / kasus
 - l. Penegakan PERDA Ramadhan kec. A. Pasar 2 pelanggaran / kasus
 - m. Penegakan PERDA Ramadhan kec. Mandastana 5 pelanggaran / kasus
 - n. Penegakan Kawasan Tanpa Rokok di Instansi Pemerintah di Kec. Marabahan 5 pelanggaran / kasus
3. Satlinmas yang dibina . Adalah salah satu IKU dari Satuan Polisi Pamong Praja. Dari hasil kinerja bidang Linmas, dimana dari kegiatan Eselon IV adalah pendataan ulang terhadap Satlinmas di desa ataupun dikecamatan dari 200 desa dan 17 kecamatan telah didapat target sekitar 100 anggota linmas yang diverifikasi ulang dalam kurun waktu 1 tahun rencana strategis jangka menengah akan tercapai sebanyak 500 Satlinmas. kedepannya linmas diberdayakan / difungsikan sesuai dengan permendagri untuk keamanan lingkungan sehingga tercapai IKU satpol tentang kecamatan dalam kondisi aman dan tertib.



3.2 Akuntabilitas Keuangan

Selama tahun 2019 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Satuan Polisi Pamong Praja melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Kuala sebesar **Rp.7.246.608.685,-** sedangkan realisasi anggaran mencapai **Rp. 6.144.229.456,-** atau dengan serapan dana APBD mencapai **84,79 %**.

Komposisi belanja Satuan Polisi Pamong Praja untuk Tahun 2019, sebagai berikut :

Tabel 3.11
Komposisi Belanja Satuan Polisi Pamong Praja
Tahun Anggaran 2019
(Sebelum Dilakukan Audit BPK-RI)

No	Uraian	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	%
1	Belanja Langsung	1.428.389.520,00	1.404.083.126,00	98,30
2	Belanja Tidak Langsung	5.818.219.165,00	4.740.146.330,00	81,47
Jumlah		7.246.608.685,00	6.144.229.456,00	84,79

Sumber: Realisasi Fisik keuangan akhir bulan Desember 2019.

Tabel di atas memperlihatkan bahwa Belanja Langsung memberikan kontribusi sebesar **98,30 %** terhadap realisasi belanja Kabupaten Barito Kuala tahun 2019, dan sisanya sebesar **81,47 %** disumbangkan Belanja Tidak Langsung.

Adapun pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target sasaran dan indikator kinerja RPJMD Kabupaten Barito Kuala yang diperjanjikan pada tahun 2019 adalah sebesar **Rp. 729.653.450,00** dengan realisasi sebesar Rp. **721.443.403,00. atau 98,87. %**, dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 3.12
Pagu dan Realisasi Anggaran
Yang Terkait Dengan Pencapaian Target Sasaran Strategis
Satuan Polisi Pamong Praja
Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.	729.653.450,00	721.443.403,00	98,87
	Jumlah	729.653.450,00	721.443.403,00	98,87

Sumber: Laporan RFK akhir bulan Desember 2019

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk efektivitas pencapaian kinerja sasaran yang diperjanjikan **Satuan Polisi Pamong Praja** pada tahun 2019.

Selain itu, terdapat pula program dan kegiatan tugas pembantuan pada Tahun Anggaran 2019. Realisasi anggaran dan capaian indikator kinerja Program/Kegiatan Tugas Pembantuan pada tahun 2019, dapat diuraikan sebagai berikut:

Untuk mengetahui efektivitas anggaran terhadap capaian Misi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, dapat diketahui dari capaian kinerja misi dan anggaran yang digunakan pada tahun 2019 sebagaimana tabel berikut :



Tabel 3.13
Pagu dan Realisasi Anggaran
Yang Terkait Dengan Pencapaian Target
Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja
Tahun 2019

No	Sasaran	Indikator	Anggaran	Realisasi	% Penyerapan Anggaran
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Prosentase Kecamatan dengan kondisi aman dan tertib	625.871.400	617.863.565	98,70
		Persentase pelanggaran PERDA yang ditindak lanjuti	103.244.250	103.151.041	99,91
		Persentase Penanggulangan Kebakaran	140.350.000	137.474.300	97,94
	Jumlah				

Secara umum dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran pada Tahun 2019 dapat dikatakan efektif terhadap pencapaian kinerja sasaran strategis **Satuan Polisi Pamong Praja**

Analisa Efisiensi

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari 100%. Terlihat mayoritas dari 3 indikator Kinerja menunjukkan pencapaian 93,09 % yaitu sebanyak 1 sasaran. Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi.

Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.



Tabel 3.14

**Efektifitas dan Efisiensi Anggaran terhadap Capaian Sasaran
Pemerintah Kabupaten Barito Kuala
Tahun 2019**

No	Sasaran	Indikator	% Capaian Kinerja (≥100%)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4		
1	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Prosentase Kecamatan dengan kondisi aman dan tertib	99,53	98,70	0,83
		Persentase pelanggaran PERDA yang ditindak lanjuti	99,74	99,91	-0,16
		Persentase Penanggulangan Kebakaran	80	97,94	-0,17

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan di dukung dengan 1 Program Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan Tindak Kriminal dengan 3 kegiatan dan 3 Bidang sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Pol PP

Pagu Rp.519.803.800,00

Realisasi Rp.512.528.180,00 Realisasi anggaran 98,60 %

Target kinerja Kecamatan dengan kondisi tentram dan tertib gangguan kantrantibum 65 %

Realisasi kinerja Kecamatan dengan kondisi tentram dan tertib gangguan kantrantibum 64,70 %

Bidang Trantibum realisasi kinerja 99,53 %

2. Kegiatan Monitoring , evaluasi dan pelaporan Bidang PPHD

Pagu Rp.103.244.250,00

Realisasi Rp.103.151.041,00 Realisasi anggaran 99,91 %



Target Kinerja 79 % pelanggaran PERDA yang ditindak lanjuti dengan realisasi 78,78 Pelanggar PERDA yang ditindak lanjuti realisasi kinerja 99,74 %

3. Kegiatan Penanggulanga Bencana Kebakaran

Pagu Rp.140.360.000,00

Realisasi Rp.137.474.300,00 Realisasi anggaran 97,94 %

Target Kinerja 55 % kasus kebakaran yang ditangani dengan realisasi 44,44% kasus kebakaran yang ditangani realisasi kinerja 99,74 %



BAB IV. PENUTUP

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala merupakan perangkat organisasi atau satuan kerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kegiatan, Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Barito Kuala berada di bawah dan dalam pembinaan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

Pengukuran pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 memberi kesimpulan bahwa capaian kinerja Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 walaupun tercapai namun dapat dikatakan baik dengan nilai rata-rata capaian Indikator Kinerja Kegiatan **93,09 %** terhadap target kinerja yang ditetapkan.

Pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala tahun 2018 diselenggarakan secara sinergi oleh 7 Program kegiatan yakni, 1) Program Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal; 2) Program Peningkatan Peningkatan dan Kenyamanan Lingkungan; 3) Program Peningkatan Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala daerah / Wakil Kepala daerah; 4) Program Penanggulangan Kebakaran; 5) Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur 6) Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur ; 7) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran



Laporan Kinerja ini merupakan bagian dari evaluasi penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala, yang diharapkan akan dapat lebih meningkatkan kinerja pencapaian sasaran berdasarkan visi dan misi yang ditetapkan. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait.

Beberapa strategi yang akan dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala, agar permasalahan-permasalahan tersebut tidak terulang di tahun 2020, antara lain:

- 1) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala memprioritaskan anggaran yang terkait dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan melakukan pemantauan secara berkala terhadap capaian kinerja terutama pada indikator yang belum mencapai target kinerja.
- 2) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala perlu meninformasikan bahwa 1 (satu) Indikator Kinerja Utama yang berkenaan dengan kecamatan dengan kondisi aman dan tertib sebanyak 17 kecamatan belum sepenuhnya dilakukan pemantauan, patrolirutin karna belum tersediannya anggaran dan selama ini hanya ikut di kegiatan lain.
- 3) Mengusulkan kepada pemerintah daerah agar dapat dilakukan peningkatan wawasan kepada para pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala tentang Proses Penganggaran hingga pertanggungjawaban kegiatan khususnya bidang bidang
- 4) Mengusulkan kepada Pemerintah Daerah agar dapat diberikan tambahan anggaran dan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala terutama tenaga teknis fungsional dan



administrasi. sehingga pelaksanaan rencana strategis maupun rencana kerja dapat dioptimalkan.

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

M.ANJAR WIJAYA,S.SOS
NIP. 19640424V198503 1 017